



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENGAWASAN  
PENGUNAAN DANA DESA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan  
Pendidikan Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

**Disusun oleh :  
SISWANTO  
NPM. 231003742010118**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SEMARANG  
2024**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM

KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :  
SISWANTO  
231003742010118

Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

Dr. Kunarto, S.H., M.Hum  
NIDN : 0619036404

Anggota,

Widayanti, SE., S.H., M.H  
NIDN : 06270770002

Anggota,

Dr. Aniek Tyaswati WL, S.H., M.Hum  
NIDN : 0602126201



Mengetahui  
dan menyetujui,

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0625046301

SEMARANG  
TAHUN 2024

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAM PERNYATAAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Kedudukan Kepolisian .....	13
B. Pengawasan .....	19
C. Dana Desa .....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Lokasi Penelitian .....	41
D. Subjek dan Obyek Penelitian .....	41
E. Sumber Data.....	42
F. Teknik Pengumpulan Data .....	43

G. Analisis Data .....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	46
A. Pengaturan Hukum Kepolisian Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian .....	46
B. Kewenangan Kepolisian Terhadap Pengawasan Penggunaan Dana Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa .....	51
C. Hambatan Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa Serta Upaya Mengatasinya.....	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	79
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	8

## Abstrak

### **KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA (Studi di Desa Padurenan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus)**

Siswanto  
231003742010118

*Tujuan Penelitian ini untuk mengkaji Penegakan Hukum Kepolisian Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, untuk Mengetahui Kewenangan Kepolisian dalam Pengawasan Penggunaan dana desa berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014, serta untuk Mengetahui Problematika Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian Dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa. Penelitian ini bersifat deskriptif melalui pendekatan kepada penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.*

*Mekanisme pengawasan kepolisian dipolakan ke dalam dua jenis pengawasan yakni, pengawasan rutin dan pengawasan insidental. Pertama, pengawasan rutin adalah merupakan jenis pengawasan yang dilakukan oleh pengembian fungsi pengawas secara terus menerus dan berlanjut dalam rangka pemantauan. Penekanan dalam pengawasan ini sebagai usaha pembinaan agar dalam melaksanakan tugas dan wewenang sejalan dengan tujuan organisasi atau lembaga, selain itu juga untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam menjalankan tugas dan wewenang kepolisian. Bentuk kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam pengawasan dana*

*desa, yang dimana dalam persoalan yang dihadapi pihak kepolisian bahwasannya peran dari pihak kepolisian yang tidak diikut sertakan dalam musyawarah anggaran dana desa sehingga tidak mengetahui secara menyeluruh mengenai anggaran dana desa yang dikeluarkan oleh pemerintah karena bersifat tertutup.*

*Berdasarkan hasil penelitian ini dapat di pahami dengan di berikannya kewenangan kepolisian dalam pengawasan penggunaan dana desa, seharusnya kepolisian lebih mengaplikasikan peran dan fungsinya dalam pengawasan penggunaan dana desa melalui pendidikan atau menyeleksi anggota kepolisian yang baik yang memang memiliki integritas maupun kapabilitas untuk mencapai tujuannya sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimana dalam undang-undang tersebut desa mengatur peran serta pengawasan.*

**Kata Kunci :** *Keolisian, Pengawasan Penggunaan Dana Desa, Studi Kasus di Desa Padurenan Kec.Gebog kab.Kudus*

## *Abstract*

### *POLICE AUTHORITY TO SUPERVISE THE USE OF VILLAGE FUNDS (Study at Padurenan Village, Kudus Regency)*

*Siswanto*  
231003742010118

*The aim of this research is to examine Police Law Enforcement Based on Law Number 2 of 2002, to determine the Police's Authority in Supervising the Use of Village Funds based on Law Number 6 of 2014, and to determine the Problems of Implementing Police Authority in Supervising the Use of Village Funds. This research is descriptive in nature through an approach to normative juridical research, namely research carried out that merely describes the condition of an object or event without any intention of drawing generally applicable conclusions. The police supervision mechanism is patterned into two types of supervision, namely, routine supervision and incidental supervision. First, routine supervision is a type of supervision carried out by those carrying supervisory functions continuously and continuously in the context of monitoring. The emphasis in this supervision is as a guidance effort so that carrying out duties and authority is in line with the goals of the organization or institution, as well as preventing irregularities in carrying out police duties and authority. Forms of obstacles faced by the police in monitoring funds*

*village, where in the problems faced by the police, the role of the police is not being included in the village fund budget deliberations so they do not know thoroughly about the village fund budget issued by the government because it is closed.*

*Based on the results of this research, it can be understood that by giving the police authority to supervise the use of village funds, the police should apply their role and function more in monitoring the use of village funds through education or selecting good police officers who have the integrity and capability to achieve their goals in accordance with the mandate. from Law Number 6 of 2014 concerning Villages where in this law villages regulate their role and supervision.*

**Keywords:** *Police, Monitoring the Use of Village Funds, Case Study in the Padurenan Village.*